

PERANAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PUBLIC POLICE MAKING KOTA
LANGSA PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar S.H.

OLEH:

RYO ALFANI
NIM. 2032020009



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER LANGSA
1445 H / 2023 M

SKRIPSI

**PERANAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP *PUBLIC POLICY MAKING*
KOTA LANGSA PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

Diajukan Oleh:

RYO ALFANI
NIM: 2032020009

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HTN/Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

PEMBIMBING II



Asih Pertiwi, M.H
NIP. 19951216 202203 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RYO ALFANI

NIM : 2032020009

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 26 Desember 2001

Fakultas : Syariah

Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara

Alamat : Dusun Persatuan, GP. Baro Langsa Lama, Kota Langsa.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERANAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP *PUBLIC POLICY MAKING* KOTA LANGSA PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Agustus 2023



Yang membuat pernyataan

RYO ALFANI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peranan Partai Demokrat Terhadap *Public Policy Making* Kota Langsa Prespektif Hukum Tata Negara Islam” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal, 23 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 07 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah
IAIN Langsa

Ketua



Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

Sekretaris



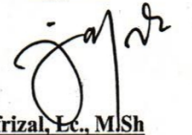
Asih Pertiwi M.H
NIP. 19951216 202203 2 003

Anggota I



Anizar M.A
NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota II



Sufrizal Lc. MSh
NIP. 19860705 202012 1 007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

Abstrak

Kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan, termasuk dari segi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partai politik. Perlu ada peningkatan kerjasama untuk mencapai pembangunan yang adil dan seimbang. Tujuan Penelitian ini untuk merumuskan kebijakan publik untuk mengatasi tantangan permasalahan melalui peran Partai Demokrat terhadap Public Police Making di Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, khususnya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan observasi langsung terhadap subjek untuk mengumpulkan data yang relevan. Hasil penelitian yang didapatkan Partai Demokrat memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan publik. Partai tersebut berfungsi sebagai saluran bagi tuntutan dan dukungan yang berasal dari masyarakat. Melalui proses komunikasi dan kepemimpinan yang dimiliki, Partai Demokrat dapat membantu pemerintah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum. Faktor solidaritas partai politik juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi formulasi kebijakan publik. Partai Demokrat juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat untuk memahami aspirasi mereka, yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrat, Public Police

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul "PERANAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PUBLIK POLICE MEKING KOTA LANGSA PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Ibu Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos, M.Pem, M.Pd selaku pembimbing pertama dan Ibu Asih Pertiwi, M.Hs selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, Januari 2024

Penulis,

RYO ALFANI
NIM. 2032020009

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (dilambangkan dengan gabungan huruf) أو^أ aw, misalnya: al-yawm.

- b. Vokal rangkap (dilambangkan dengan gabungan huruf) أُي ay, misalnya: al-bayt.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (= الع لوم al-ʿal-fatihah), (= الف اتحة al-fatihah), (= ق يمة al-ʿulūm) dan (= ق يمة al-qimah).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (= ه اددun haaddun), (= ح دد saddun), (= ط ييب taayyib).

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANii

SURAT PERNYATAANiii

ABSTRACTiv

KATA PENGANTARv

PEDOMAN TRANSLITERASivii

DAFTAR ISIx

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Batasan Masalah5

C. Identifikasi Masalah6

D. Rumusan Masalah6

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian6

F. Kajian Terdahulu7

G. Sistematika Pembahasan12

BAB II KAJIAN TEORITIS14

A. Partai Politik14

1. Pengertian Partai Politik14

2.	Fungsi Partai Politik	16
3.	Tujuan Partai Politik	18
B.	Publik Police Making	20
1.	Pengertian Kebijakan Publik	20
2.	Perumusan Model Kebijakan Publik	26
3.	Implementasi Kebijakan Publik	29
4.	Evaluasi Kebijakan Publik	30
5.	Fungsi Kebijakan Publik	33
C.	Hukum Tata Negara Islam	34
1.	Islam dan Demokrasi	38
2.	Pemerintahan	39
3.	Paradigma Pemikiran Politik Konsep Negara	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		46
A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	46
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C.	Subjek dan Objek Penelitian	47
D.	Sumber Data Penelitian	48
E.	Teknik Pengumpulan Data	49
F.	Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
A.	Gambaran Umum Partai Demokrat	53
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
C.	Kondisi, Isu yang ada di Kota Langsa	68
D.	Peranan Partai Demokrat Terhadap Kebijakan Publik	69
E.	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Peran DPC Partai Demokrat terhadap Public Police Making	86
F.	Peran Partai Politik Terhadap Public Police Making Perspektif Hukum Tata Negara Islam	88
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-negara di dunia sekarang ini cenderung mendasarkan pada asas demokrasi, walaupun dalam pelaksanaannya tentu tidak sama, sehingga negara Republik Indonesia memilih asas Demokrasi Pancasila. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yaitu suatu bentuk kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia di pimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi, pemimpin tersebut harus dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yaitu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai dengan kepala desa.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik Indonesia.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang

sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebenarnya demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattschneider (1942). "Political parties created democracy". Oleh karena itu, partai politik adalah pilar yang penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Permasalahan terkait keterbatasan alokasi anggaran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang ada di Kota Langsa masih dalam kategori rendah. Dapat dibuktikan bahwa Kota Langsa memiliki kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal yang rendah. Hampir setiap tahunnya (2017–2019) capaian PAD Kota Langsa berada di bawah capaian danaperimbangan dari Pemerintah Pusat. Apabila dihubungkan dengan jumlah penduduk miskin, maka Kota Langsa belum mampu untuk mengulanginya secara mandiri oleh karena kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal rendah. Tentunya peran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sangat diharapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, Fleksibilitas dan sustainability program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa masih membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di masa yang akan

datang.

Hal ini juga berupaya memahami dinamika dan peranan perumusan kebijakan publik, keterlibatan partai politik dalam mengatasi permasalahan sosial, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan untuk mencapai pembangunan yang adil dan seimbang. Peranan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas Partai dalam merumuskan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Partai Demokrat merupakan sebuah kewajaran dalam sebuah sistem demokrasi. Demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Demokrat adalah salah satu sarana yang memiliki ragam fungsi, program partai (platform) dan dasar pemikiran. Fungsi Demokrat sebagai salah satu partai politik bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menilai demokratisasi dalam suatu pemerintahan. Pada perkembangannya, Partai demokrat atau partai politik lainnya dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan (policy) melalui sistem ketatanegaraan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk mendirikan partai politik, maka disinilah kita mengetahui sesungguhnya dua instrumen penting negara yaitu bagaimana pemerintah atau negara dan warga negara tersebut berinteraksi.

Kontribusi dan posisi Demokrat sebagai Partai Politik dalam proses interaksi antara pemerintah atau negara dengan rakyat dalam wujud kebijakan, disadari telah menjadi idealitas terjauh dari identitas partai modern. Masyarakat modern adalah mereka yang memandang politik tidak lagi sebatas ikatan ideologis dan keyakinan semata. Menurut Koirudin dalam Fitria, Masyarakat modern lebih melihat politik sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mengidentifikasi kualitas dari lembaga-lembaga sosial politik yang hidup di masyarakat. Masyarakat modern semakin cerdas dan makin cukup akses terhadap informasi perubahan-perubahan yang terjadi saat sekarang ini. Masyarakat modern adalah mereka yang benar-benar memahami arti partisipasi mereka dalam proses politik negara.

Jika ditinjau dari struktur politik, revolusi membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik Indonesia, karena pada saat itu masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk bisa memahami segala perubahan tersebut. Frederich dalam Prayetno, mengatakan bahwa: partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan

kegunaan materiil kepada anggotanya. Berdasarkan hal itu, Partai Demokrat juga dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pendapat didalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk suatu partai sesuai dengan ragam pendapat yang hidup. Perlu diketahui bahwa, sebagai partai Demokrat juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana setiap partai menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan.

David Easton, mengatakan bahwa terdapat tiga proses yang menjadi saluran bagi terselenggaranya sebuah sistem, yaitu input, process dan output. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat, process yang tidak lain adalah proses pembuatan kebijakan, dan output yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Dapat dikatakan bahwa partai demokrat merupakan saluran bagi sebuah sistem politik yang terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datangnya dari masyarakat. Sehingga membantu pemerintah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum (policy public).

Dari uraian dan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk memperdalam sejauhmana sesungguhnya peran partai demokrat dalam upaya mendukung dan ikut menentukan peroses perumusan kebijakan publik di di Kota Langsa dengan judul penelitian "Peranan Partai

Demokrat Terhadap Publik Police Making Kota Langsa Prespektif Hukum Tata Negara Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik, maka peneliti akan membuat batasan penelitian atau batasan masalah. Adapun batasan masalah yang diteliti lebih lanjut tentang peran partai demokrat dalam membuat kebijakan publik dalam mensejahterakan masyarakat di Kota Langsa.

C. Identifikasi Masalah

1. Kota Langsa memiliki kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal yang Masih rendah dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah capaian dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
2. Fleksibilitas dan sustainabilitas program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa masih membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.
3. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas fiskal dalam menangani masalah kemiskinan dan infrastruktur di Kota Langsa.
4. Butuhnya dukungan dari pemerintahan dalam membuat kebijakan guna mensejahterakan masyarakat Kota Langsa.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Partai Demokrat terhadap Public Police Making Kota di Kota Langsa?
2. Bagaimana Peran Partai Demokrat terhadap Public Police Making di Kota Langsa di timjau dari perspektif Hukum Tata Negara Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Partai Demokrat terhadap Public Police Making Kota di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui Peran Partai Demokrat terhadap Public Police Making di Kota Langsa di timjau dari perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara Islam terutama yang berkaitan dengan Public Police Making.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang dapat menunjang ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata

Negara.

F. Kajian Terdahulu

1. Dadi Junaedi Iskandar dengan judul “Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik”. Model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakkan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokrasi. Demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan kebijakan pembangunan. kajian ini menggunakan metode dokumenter, yakni melakukan pelacakan informasi yang diperoleh dari kliping dan data lainnya yang berasal dari dokumen ekstern yang resmi berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin berita-berita yang disiarkan ke media massa, sehingga dengan sumber informasi tersebut dapat menelaah lebih mendalam mengenai masalah yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan, bahwa di dalam era demokrasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap

kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat. kontribusi partisipasi warga yang produktif dan peran kelembagaan politik yang dikembangkan secara deliberatif dan terbuka dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi pembentukan kebijakan publik yang bermakna.

2. Chaerul Umam(2021) dengan judul “Peran Partai Politik Dalam Pengambilan Kebijakan Publik. Tujuan penelitian adalah menganalisis konstruksi regulasi mengenai peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini termasuk menguji kemampuan partai politik untuk menyelaraskan diri dengan tujuan pendiriannya, terutama dalam konteks keputusan kebijakan publik yang kontroversial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi yang dibutuhkan partai politik agar dapat secara efektif mencapai tujuan mereka dalam proses pembuatan kebijakan publik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada peran partai politik dalam perumusan kebijakan publik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, khususnya menggunakan metode yuridis-normatif dengan fokus pada konsep hukum positif. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan, dan analisis hukum kualitatif untuk

mengumpulkan bahan-bahan hukum teoritis, menganalisisnya, dan menafsirkan muatan hukum terkait dengan situasi dan pandangan masyarakat saat ini. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini mencakup kontribusi teoretis terhadap pendidikan politik, implikasi praktis bagi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta manfaat sosial dalam hal kesadaran masyarakat dan keterlibatan politik.

3. Poni Sukaesih Kurniati (2023) berjudul “Peningkatan Pengetahuan Kader Muda Partai Golongan Karya (Golkar) Tentang Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Kebijakan Publik Guna Mewujudkan Good Governace”. untuk meningkatkan pengetahuan kader muda Partai Golongan Karya (GOLKAR) tentang peran dan fungsi partai politik dalam kebijakan Publik guna mewujudkan good governance di Indonesia. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan adalah melalui pelatihan atau workshop yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari melalui workshop dengan tehnik focus gruf Discussion guna membahas masalah-masalah yang dihadapi kader muda partai golkar serta praktek dari materi yang diberikan terkait fungsi dari partai politik. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa fungsi

partai GOLKAR belum berfungsi dengan optimal, terutama terkait fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pengatur dan pengendali konflik dalam kaitannya dengan tahapan kebijakan publik yang mengarah pada terwujudnya good governance di Indonesia. Kesimpulannya adalah Parpol memiliki peran penting dalam kebijakan publik melalui ketaatan dan komitmen menerapkan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku. Parpol juga memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Kalau parpol tidak melaksanakan peran itu, maka ia dapat ditinggalkan oleh pemilihnya dan kehilangan alasan eksistensinya.

4. Diva Aura Amelia (2023), Partisipasi dan Relasi Cso-Partai Politik dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus IDI dan Parpol PDIP pada RUUKesehatan). Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana partisipasi Cso-partai politik dalam kebijakan publik. metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen, dan materi yang diunduh dari internet. Kemudian, hasil penemuan memperlihatkan bahwa penyebab utama adanya konfrontasi tersebut karena tidak adanya

perlibatan secara aktif yang dilakukan oleh PDIP dalam merumuskan RUU Kesehatan Omnibus Law dan hubungan relasi antara IDI dengan PDIP adalah oposisi dan hubungan atau kompetisi yang keras satu dengan yang lainnya dan termasuk tidak memiliki relasi yang dekat.

5. Bayu Dwi Anggono dengan judul (2019), Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan partai politik dalam mewujudkan peraturan Perundang-Undangan Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah dengan pendekatan konseptual, dengan mendasarkan pada kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, serta fungsi partai politik dalam negara demokratis. Temuan yang didapat yaitu fungsi legislasi sering dikesampingkan dibanding fungsi pengawasan dan anggaran, politik mayoritas menjadi dasar pemikiran para pembuat peraturan perundang-undangan dan bukan ukuran ideologi atau konstitusional, pragmatisme perekrutan calon anggota parlemen, serta adanya perilaku korupsi legislasi. Untuk meningkatkan peran partai politik mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Pancasila dapat dilakukan dengan cara mewajibkan Parpol di semua tingkatan

menyusun desain politik legislasi dalam masa kampanye

Pemilu, kepengurusan Parpol dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen salah satunya calon anggota lembaga perwakilan, ketegasan Parpol untuk menarik atau mengganti anggotanya di lembaga perwakilan yang lalai dalam menjalankan politik legislasi Pancasila, memasukkan kurikulum pendidikan Pancasila dalam pengkaderan anggota Parpol secara berjenjang dan berkelanjutan, dan negara segera membuat panduan atau pedoman sebagai dokumen resmi dalam menafsirkan dan memahami sila-sila Pancasila.

Penelitian sebelumnya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian sebelumnya, terdapat fokus pada peran partai politik dalam pembuatan kebijakan publik, namun dari perspektif yang mungkin berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mirip dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis. Namun, perbedaannya mungkin terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan kerangka teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya juga mungkin memiliki tujuan dan manfaat penelitian yang berbeda sesuai dengan konteks dan lingkup penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS, yang mencakup tentang Peran Partai Demokrat terhadap Public Police Making menurut perspektif Hukum Tata Negara Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, yang mencakup tentang jenis pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, dan teknik analisis penelitian.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Partai Demokrat

1. Sejarah Umum Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo

Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suaranya dalam pemilihan cawapres dan hasil polling publik yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang.

Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana yaitu jalannya satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden.

Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari: (1). Vence Rumangkang,

(2).Drs.A.YaniWahid(Alm), (3).AchmadKurnia,
(4).AdhiyaksaDault,SH,(5). BaharuddinTonti,(6).Shirato Syafei. Di
lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-
diskusiuntukpendiriansebuahpartaibagikendaraanpolitikSBYdipimpin oleh
Drs. A. Yani Wachid (Almarhum).

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung
pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat.
Dalam pertemuan
tersebut,saudaraVenceRumangkangmenyatakanbahwarencanapendirian
partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.
(Tanggal20Agustus2001,saudaraVenceRumangkang yangdibantuoleh
saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang
untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya,
terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang
bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai
politik yakni :

1. VenceRumangkang;
2. Dr.AhmadMubarok, MA.;
3. Drs.A.YaniWachid(almarhum);
4. Prof.Dr.SuburBudhisantoso;
5. Prof.Dr.Irzan Tanjung;
6. RMH.HeroeSyswantoNs.;

7. Prof.Dr.RF.Saragjh,SH.,MH.;
8. Prof.Dardji Darmodihardjo;
9. Prof.Dr.Ir.RizaldMax Rompas;dan
10. Prof.Dr.TRusliRamli,MS.

Selain nama- nama tersebut ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY. Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (lima puluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9.

Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusan pun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara

Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

2. Pengesahan Partai Demokrat

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.

Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi

menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres.

3. Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

1. Mengusahakan terlaksananya tujuan dan usaha-usaha partai di daerah yang bersangkutan, menjalankan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan partai atau instruksi-instruksi yang

diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan menjalankan keputusan musyawarah cabang.

2. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Anak Cabang Partai di tingkat kecamatan dan Pimpinan Ranting di Partai di tingkat Kecamatan dan Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan/ desa di dalam daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis kebijaksanaan partai serta ketentuan-ketentuan partai.
3. Memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah mengenai Perkembangan partai didaerahnya, dan fakta-fakta dan perkembangan politik dan lain-lain didaerahnya.
4. Hak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat 3 Kabupaten Kota
 - a. Membuat peraturan-peraturan bagi kelancaran usaha-usaha partai didaerahnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
 - b. Mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Mewakili partai dalam tindakan keluar sejauh yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan daerah cabangnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Daerah

masing-masing.

5. Visi dan Misi Partai Demokrat Visi :

Partai Demokrat untuk Indonesia Masa Depan

- a. Indonesia menjadi Negara Maju di Abad 21.
- b. Indonesia menjadi Negara Kuat di tahun 2045.
- c. Indonesia menjadi Emerging Economy di tahun 2030.

Partai Demokrat Masa Depan

- a. Menjadi partai politik masa depan yang Kuat, berintegritas dan berkapasitas.
- b. Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman
- c. Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.
- d. Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
- e. Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai Pro Rakyat Kecil.

MISI :

- a. Sebagai salah satu kekuatan politik nasional
Partai Demokrat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional, menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin

adil, makin sejahtera dan makin demokratis.

b. Sebagai partai politik,

Partai Demokrat mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
- 2) Memenangkan pemilihan umum tingkat daerah, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah.
- 3) Mempersiapkan kader-kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif.
- 4) Menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan rakyat guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, untuk selanjutnya diperjuangkan di berbagai medan pengabdian dan penugasan partai.
- 5) Menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, menuju masa depan Partai Demokrat yang makin kuat, makin modern, makin dicintai rakyat dan makin kontributif bagi pembangunan bangsa.

6. Program Partai Demokrat

Partai Demokrat sebagai salah satu kekuatan di perpolitikan Indonesia tentu memiliki beberapa program khusus untuk menarik

simpatik masyarakat agar dapat memilih demokrat sebagai pilihan pada momen Pemilu. Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono demokrat memiliki 10 (sepuluh) program unggulan yaitu sebagai berikut :

- 1) Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.
- 2) Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS dengan mengutamakan golongan kurang mampu.
- 3) Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM Premium.
- 4) Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.
- 5) Setop impor pangan ketika musim panen.
- 6) Tingkatkan gaji pegawai, termasuk guru, TNI & Polri dan pensiunan, agar memiliki daya beli yang baik.
- 7) Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha agar bisa tumbuh baik dan bisa tingkatkan upah buruh.
- 8) Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota.
- 9) Angkat secara bertahap guru dan pegawai honorer dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa.
- 10) Kontrol dan batasi utang pemerintah dan BUMN agar tak bebani anak cucu.
- 11) Lanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur

pedesaan, sesuai kemampuan keuangan negara.

- 12) Berikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara termasuk kemerdekaan pers.
- 13) Jaga kebhinekaan dan kerukunan antar identitas (SARA) dan cegah perpecahan bangsa.
- 14) Lanjutkan dan tingkatkan program pro rakyat SBY, seperti BOS,BPJS, Bantuan Lansia, Disabilitas, dan Bencana,PKH, RASKIN, BLT/BLSM, KUR, PNPM, dan lain-lain, untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

7. Lambang dan Makna Partai Demokrat

a. Lambang Partai Demokrat



b. Makna Lambang Partai Demokrat

Lambang Partai Demokrat berupa gambar bintang bersinar tiga arah yang berwarna merah dan putih di masing-masing sisinya, dengan latar belakang berwarna biru tua di bagian atas dan bawah, dan biru laut dibagian tengah.

Adapun makna dari lambing tersebut adalah:

- 1) Bintang bersinar tiga bermakna tiga kesatuan wawasan partai yang tidak dapat dipisahkan, yakni:
 - a) Nasional-religius bermakna wawasan nasionalis, serta sekaligus bermoral agama.
 - b) Pluarilisme bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai dan semua ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keberadaban ciri khas setiap daerah yang menyatusebagai Bangsa Indonesia.
 - c) Humanisme bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat peri kemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagaibuktibahwa Bangsa Indonesiaadalahbagian yang integral dari masyarakat dunia.
- 2) Warna biru laut yang terdapat ditengah melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
- 3) Warna biru tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnyacita-citabangsa,makabersikaptegas,mantap,percaya diri, dan

— —

penuh optimis yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan Negara.

- 4) Warna merah putih di masing-masing sisi bintang dengan latar belakang biru laut, memberi arti warna merah putih adalah kebangsaanataunasionalisme,danwarnabiruartihumanismedi tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme, yang merupakan wawasan Parta Demokrat.
- 5) Warna dasar biru laut, seperti halnya samudera yang membentang luas sebagai terminal akhir bagi aliran dan muara dari berbagai sungaiyangmembawasegalamacamlimbahmembaurdanmenyatu menjadi jernih, namun terlihat berwarna kebiruan, tenang, damai, demikianpulahalnyaPartaiDemokrat,tampilsebagaipartaipolitik yang mampu menghimpun segenap warga Negara Indonesia untuk hidup bersama dan berdampingan dan saling menghormati antar sesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan.

8. Deskripsi Tentang DPC Partai Demokrat 3 Kabupaten Kota

Tabel 4.1

Dewan Pimpinan Anak Cabang

N O	Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab/Kota di Aceh
1.	DPC Partai Demokrat Kabupaten Simeulue
2.	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil
3.	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Selatan
4.	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tenggara
5.	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Timur
6.	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tengah
7	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat
8	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Besar
9	DPC Partai Demokrat Kabupaten Pidie
1 0	DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen
1 1	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara
1 2	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat Daya
1 3	DPC Partai Demokrat Kabupaten Gayo Lues
1 4	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang
1 5	DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya
1 6	DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Jaya
1 7	DPC Partai Demokrat Kabupaten Bener Meriah
1 8	DPC Partai Demokrat Kabupaten Pidie Jaya
1	DPC Partai Demokrat Kota Banda Aceh

9	
2 0	DPC Partai Demokrat Kota Sabang
2 1	DPC Partai Demokrat Kota Langsa
2 2	DPC Partai Demokrat Kota Lhokseumawe
2 3	DPC Partai Demokrat Kota Subulussalam

9. Struktur Kepengurusan Partai Demokrat

Berikut adalah daftar nama pengurus Partai Demokrat Aceh Periode 2019-2024, sebagai berikut :

Tabel 4.2 :

Pengurusan DPD Partai Demokrat Aceh

No	Jabatan	Nama
1.	Wakil Ketua	M. Bayu Setiawan, S.E
2.	Sekretaris	Abdul Razak

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Langsa

Letak Geografis Kota Langsa merupakan daerah dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Terletak lebih kurang 400 Km dari Kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan Kota Administratif. Langsa

kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2001 Kota Langsa memiliki luas 262,41 Km². Dengan letak geografis 04° 0' Lintang Utara 97° 0' Bujur Timur. Yang berbatasan sebelah utara dengan Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Timur dan dan Kabupaten Aceh Tamiang dan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Timur.

2. Luas Wilayah Kota Langsa

Citra Kota Langsa Gambaran Administrasi Wilayah Tahun 2002 wilayah Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 48 Desa. Pada Tahun 2007 berdasar Keputusan Walikota Langsa nomor 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan dengan bertambahnya 2 kecamatan baru yaitu Langsa Baro dan Langsa Lama yang mencakupi 51 desa. Dua kecamatan yang baru tersebut merupakan pemekaran dari kecamatan Langsa Timur dan Langsa Barat. Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi pemekaran desa menjadi 66 desa.

3. Jumlah Penduduk Kota Langsa

Tercatat dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Langsa sebanyak 192.630 jiwa.

4. Jumlah Politisi Partai Demokrat Kota Langsa

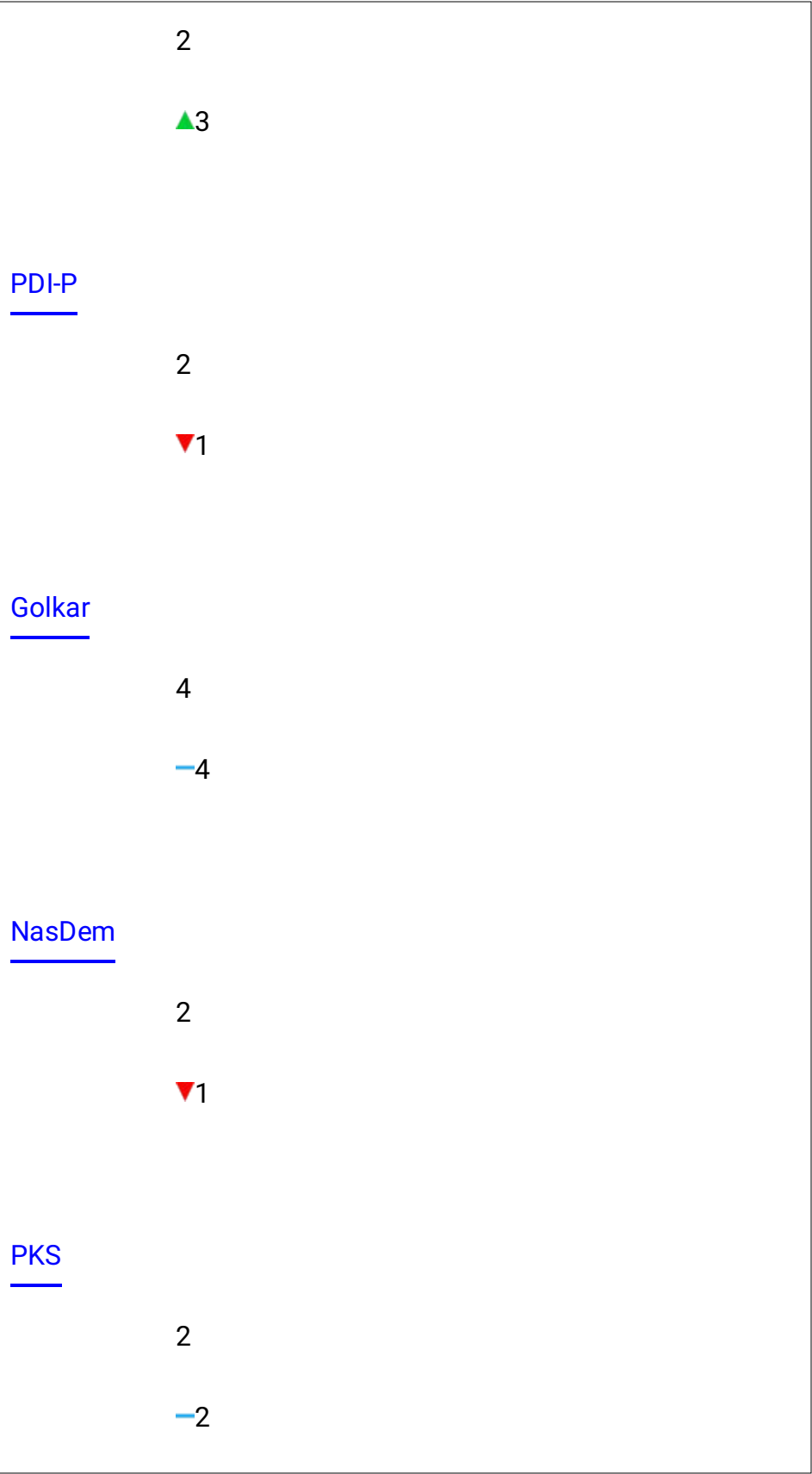
Komposisi Anggota

Berikut ini adalah komposisi anggota [DPRD](#) Kota Langsa dalam dua periode terakhir.

Tabel 4.3

Komposisi Anggota DPRD Kota Langsa

Partai Politik	
Jumlah Kursi dalam	Periode
2014-2019	
2019-2024	
Gerindra	



PAN

1

▼0

Hanura

3

—3

Demokrat

3

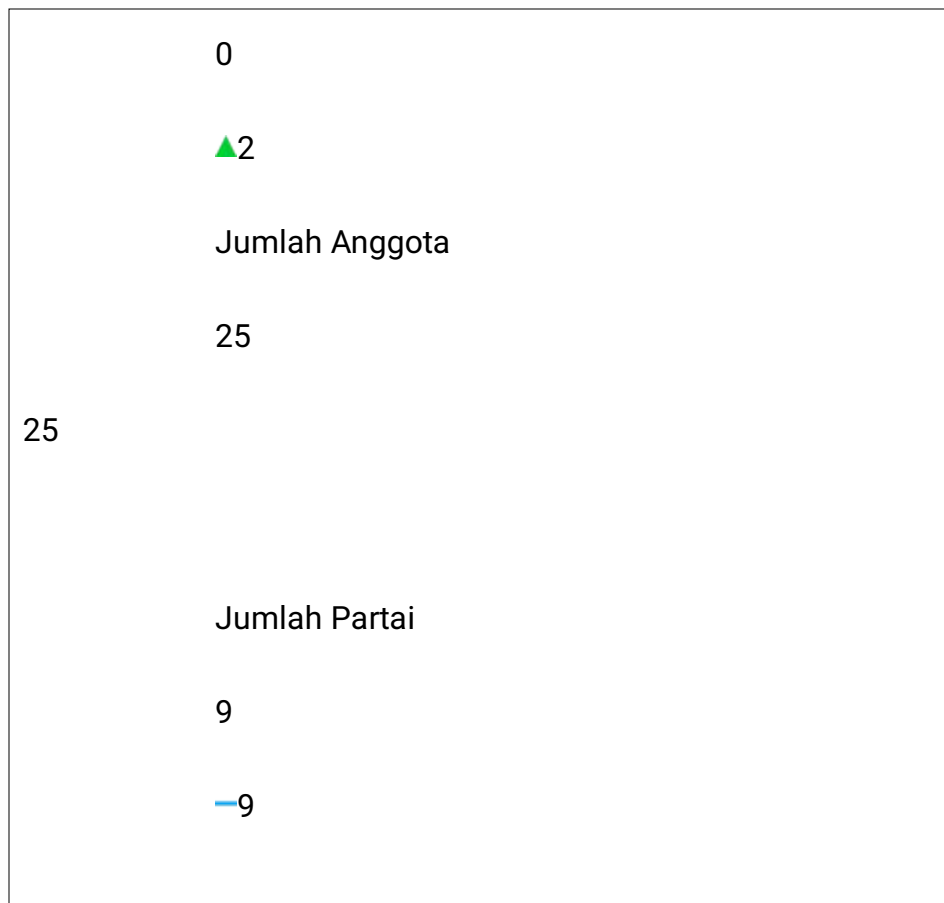
▲4

Partai Aceh

6

▼5

PNA



Fraksi Partai

Tabel 4.4

Fraksi Partai Politik di Kota Langsa

Fraksi	Partai Politik	Ketua	Jumlah Anggota
Partai Aceh	Partai Aceh	Maimul Mahdi (PA)	5

Partai Golkar	Partai Golkar	Ribuan Harja (Golkar)	4
Partai Demokrat	Demokrat	Zulfikar (Demokrat)	4
Langsa Bermartabat	Gerindra PNA NasDem	Irwanto (Gerindra)	8
Hati Nurani Demokrasi Perjuangan	Hanura PDI-P	Faisal (Hanura)	4

C. Kondisi, Isu dan Kebijakan yang ada di Kota Langsa

1. Keterbatasan kapasitas fiskal Kota Langsa menjadi hambatan serius dalam menyediakan dana yang cukup untuk menangani berbagai masalah krusial, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kemiskinan. Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam sektor-sektor tersebut. Kondisi ini mengakibatkan berbagai program dan proyek pembangunan menjadi terhambat atau bahkan terhenti karena

kurangnya sumber daya finansial yang memadai. Sebagai akibatnya, layanan kesehatan menjadi kurang optimal, fasilitas pendidikan mengalami keterbatasan, infrastruktur kota terbengkalai, dan tingkat kemiskinan sulit untuk ditangani secara efektif. Dalam situasi seperti ini, pihak pemerintahan Kota Langsa sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi antarinstansi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Langsa. Upaya untuk mencari solusi yang inovatif dan efisien juga perlu ditingkatkan agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat dan strategi yang baik, Kota Langsa dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur kota.

2. Berbagai kebijakan berkaitan dengan isu penjualan gedung Cakradonya mencerminkan konflik kepentingan yang muncul antara pemerintah dan masyarakat di Kota Langsa. Gedung tersebut menjadi pusat perhatian karena rencana penjualannya kepada Bank Aceh Syariah dengan persetujuan dari pemerintah setempat. Hal ini menimbulkan keberatan dan protes dari sebagian

masyarakat, yang menilai bahwa penjualan gedung tersebut bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Konflik ini mencerminkan dinamika politik dan sosial di Kota Langsa, di mana kepentingan masyarakat berbenturan dengan keputusan dan kebijakan pemerintah.

D. Peranan Partai Demokrat dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik (Public Policy)

Pada kehidupan politik modern yang demokratis, keberadaan Partai politik menjadi suatu keharusan. Partai politik berfungsi untuk memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, mengaktifkan dan memobilisasi rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, serta memberikan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai. Partai politik dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.

Untuk mewadahi kepentingan masyarakat, memberikan jalan kompromi bagi pemikiran/ide yang saling bersaing secara damai dan legitimate, partai politik merupakan wadah komunikasi antara pemerintah dan rakyat, partai politik harus menjadi representation of idea. Partai politik melalui jaringan struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu, sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan

penting dalam proses demokrasi, maka partai politik harus mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Artinya, Pemerintah tidak melakukan apapun termasuk dalam kategori kebijakan, karena mempertimbangkan dampak yang lebih buruk terjadi jika keputusan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat dominan ditentukan oleh lingkungan kebijakan (policy enviroment).

Kebijakan publik yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Langsa tidak terlepas dari peran DPP. Hal ini berfungsi untuk menjaga agar terjadi keselarasan ritme antara DPP, DPD dan DPC. Untuk kebijakan atau hal-hal yang sifatnya strategis dan ideologis peran itu harus mendapatkan mandat dari DPP, sedangkan untuk kebijakan yang bersifat aplikatif dan operasional maka kewenangan sepenuhnya diberikan kepada DPC. Sifat aplikatif dan operasional yang dimaksudkan adalah bahwa DPC Partai Demokrat lebih mengerti situasi lapangan dan perubahan yang terjadi di Kota Langsa, sehingga hal-hal yang bersifat lokal dapat dikelola langsung di tingkat DPC. Peran DPP dalam kaitan dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh DPC adalah peran-peran eksekusi pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya aplikatif dan operasional ditingkat lokal. Sedang untuk peran strategis dan ideologis bersifat konsultatif karena tetap menjadi kewenangan partai ditingkat

pusat.

1. Peran Eksekutif

Beberapa gambar tentang pembagian gerak peran eksekutif di Kota Langsam yangikut beberapa isu penting publik yang dilakukan oleh eksekutif diantaranya adalah:

- a. Gerakan penghijauan dan air bersih
- b. Pembangunan infrastruktur pedesaan
- c. Stimulan modal usaha, desabina dan penguatan koperasi
- d. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan serta mengembangkan potensi alternatif pangan masyarakat setempat
- e. Gerak cepat antisipasi kerawanan bencana

2. Peran Legislatif

Partai politik menyerap aspirasi masyarakat untuk menjadi program dalam pembangunan daerah. Karena itu anggota fraksi atau secara umum anggota dewan harus memahami dasar hukum UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Kepmendagri No.169 tahun 2004

Tentang Pedoman Penyusunan Legislasi Daerah, ataupun peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Peran penting partai di dewan adalah melalui fraksi dalam pembentukan peraturan daerah. Mekanisme sebuah Prolegda sampai ke Badan Legislatif, tentu melalui Sekretariat Dewan, kemudian dijadwalkan oleh Badan Musyawarah dan kemudian dibahas melalui komisi-komisi, sebelum diparipurnakan. Jika seorang anggota Dewan mempunyai aspirasi atau pendapat sendiri, maka hal tersebut dapat disampaikan melalui partai, melalui fraksi, melalui komisi atau disuarakan langsung dalam rapat-rapat yang ada didalam Badan legislatif itu sendiri. Partai melakukan pengawasan terhadap anggota fraksi sehingga dalam perjuangan politiknya tidak keluar dari garis kebijakan partai. Dalam pembahasan Perda, perda tersebut harus merupakan perda yang didukung oleh Partai, bukan hanya didukung oleh individu-individu anggota dewan di lembaga legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Bayu Setiawan,

S.E wakil I DPD Partai Demokrat Aceh sebagai berikut:

“Kalau Demokrat selama ini, sebagai pejabat eksekutif dan legislatif Jadi cara partai Demokrat berkomunikasi Langsung dengan public sehingga menjadi kebijakan publik terutama untuk pejabat itu mereka sering turun ke masyarakat dan demokrat juga selalu membuat kebijakan itu melihat lingkungan sekitar apa yang di butuhkan oleh masyarakat. Partai Demokrat selama ini mereka melakukan komunikasi itu ya turun ke lapangan berkomunikasi langsung sehingga yang menjadi aspirasi itulah yang dibawa ke eksekutif maupun legislatif sehingga dibuat sebuah kebijakan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak M. Bayu Setiawan, S.E selaku Wakil I DPD Partai Demokrat Aceh menyampaikan bahwa dari partai demokrat dalam membuat suatu kebijakan publik dengan cara terjun langsung kelapangan dan menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersampaikan oleh Partai Demokrat.

Adapun fungsi dan peranan partai politik khususnya dalam Negara demokratis, antara lain :

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Kebijakan publik dibuat untuk penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak, terutama pemerintah yang diorientasikan pada penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat, pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, agar memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diawal tadi, bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa tersalurkan kepada pemerintah, maka disinilah fungsi dari partai politik yang akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Oleh Pemerintah Daerah juga harus dapat menampung semua aspirasi masyarakat (asmar) untuk dapat diakomodir yang berasal dari Usul ataupun kebijaksanaan partai dalam anggaran dan diproses sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari musrenbang desa, kecamatan, kab/kota sampai ditingkat pusat dan pada akhirnya merupakan Kebijakan Umum (Public Policy) atau dalam bentuk RPJP/RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah) yang kesemua ini adalah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, partai politik juga dapat menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat, kegiatan atau program-program pemerintah dalam bentuk Kebijakan Umum, dengan demikian kalau hal ini terjadi, maka akan terciptakan komunikasi politik dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas kebawah, dimana partai politik dapat memainkan peranannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Melihat hal diatas, partai politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dan bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai penguat suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Bayu Setiawan selaku Wakil I DPD Partai Demokrat Aceh menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan-kebijakan yang di buat tentunya kebijakan yang pro terhadap rakyat bukan kebijakan untuk kepentingan partai Demokrat sahaja tetapi kebijakan yang melihat dari kesejahteraan rakyat karena motonya Demokrat itu “Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat”. Banyak yang udah dikerjain Demokrat sekarang ini secara langsung, secara individu maupun secara partainya, seperti membantu masyarakat dan berkontribusi terhadap bencana alam,

bantuan sosial, bantu dan lindungu UMKM, memberikan pertahanan subsidi pupuk bagi para petani, berikan hukum kepada rakyat secara adil dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya”.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Mahrudin sebagai berikut:

“Partai Demokrat membuat kebijakan publik bersama dengan partai² yang lain yang ada di parlemen Langsa dengan mengusulkan menjadi Rancangan Qanun yang di sahkan oleh walikota langsa menjadi Qanun Kota Langsa. Banyak Qanun yang telah di sahkan oleh DPRK Langsa bisa di lihat di situs web Kota Langsa”.

Adapun lanjutan wawancara dengan Bapak Khairul Rizalselaku ketua bakomstra Demokrat Kota Langsa, sebagai berikut:

“Kebijakan publik yang dibuat oleh partai demokrat ditingkat DPC semua sama ,semua mengacu kepada 14 prioritas kebijakan partai demokrat.yang pertama menciptakan lebih banyak lapangan kerja termasuk untuk milineal dan perempuan serta batasi tenaga kerja asing hingga sampe ke 14 bisa dilihat sendiri diinternet.14 prioritas partai demokrat secara garis besar kebijakan yang dilakukan oleh partai demokrat semua adalah prioritas untuk rakyat.14 prioritas partai demokrat itu menjadi dasar pedoman ,dasar acuan,dasar pemikiran,dasar gerakan politik yang dilakukan oleh partai demokrat diseluruh tingkatan dan tidak boleh melenceng dari 14 prioritas itu.

Rakyat sebagai subjek dari sistem demokrasi di Indonesia, mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui kebijakan perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat. Aspirasi masyarakat tidak mudah untuk sampai kepada pembuat kebijakan padahal partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya

pembangunan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi mengandung arti yang amat dalam dan sangat luas dalam hal informasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan, dan penilaian pembangunan. partisipasi juga dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Dapat dilihat bahwasanya peranan partai Demokrat Kota Langsa melalui kebijakan publik dengan mengutamakan kepentingan dan hak-hak rakyat. Menyampaikan aspirasi rakyat sebagai sarana jembatan antara rakyat dan juga pemerintahan agar sesuai dengan 14 prioritas dari partai Demokrat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh partai demokrat Kota Langsa melalui peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik yaitu membantu masyarakat dan berkontribusi terhadap bencana alam, bantuan sosial, bantu dan lindungi UMKM, memberikan pertahanan subsidi pupuk bagi para petani, berikan hukum kepada rakyat secara adil dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik mencakup suatu proses oleh masyarakat dengan norma-norma dan etika yang ada dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik, untuk dapat menjadi pemenang didalam Pemilihan Umum (Pemilu) serta menguasai pemerintah (dalam artian menjadi Kepala Daerah, Presiden ataupun pimpinan lainnya), partai politik harus bisa

mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak mungkin, dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum.

Banyak cara/siasat yang dilakukan oleh partai politik untuk mensosialisasikan dirinya, prosesnya melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus/pembekalan bagi kader-kader politik, penataran, dengar pendapat baik secara langsung ataupun melalui media massa, baliho/poster-poster yang saat sekarang mudah didapat dan murah biayanya dan lain sebagainya.

Pendidikan politik adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan dan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang harus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.

Partai politik wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat tercapainya pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwasanya partai

politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik sebagai sarana pendidikan politik yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang ataupun sesuai dengan kebutuhan di daerahnya maka tujuan khusus dari partai politik yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Sehingga harus adanya peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sosialisasi politik adalah bagian dari pendidikan politik pada umumnya. Ia adalah kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda sebagai anggota dalam sebuah komunitas sosial atau masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Bayu Setiawan selaku Wakil I DPD Partai Demokrat Aceh, sebagai berikut:

“Dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat melaksanakan program sosialisasi terhadap masyarakat secara tatap muka baik skala kecil, skala menengah maupun dalam skala besar melalui menjumpai masyarakat khususnya pada Kota Langsa dan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak adanya Money Politic di kalangan masyarakat”.

Lanjutan Wawancara dengan Bapak Khairul Rizal selaku ketua bakomstra

Demokrat Kota Langsa, sebagai berikut:

“Sarana sosialisasi Partai Demokrat melibatkan berbagai jalur komunikasi, baik melalui media massa maupun lembaga-lembaga yang memungkinkan jangkauan yang luas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat juga melibatkan berbagai forum seperti DPR dan perwakilan partai, serta melalui kontak langsung dengan masyarakat dan konstituennya. Kami juga mengadakan berbagai kegiatan dan acara yang memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat. Dalam acara tersebut, kami mencoba membangun komunikasi secara tidak langsung untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kami menghargai keluhan dan masukan dari masyarakat, dan kami berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Misalnya, kami menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga dan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperluas cakupan interaksi kami. Namun, kami tidak ingin mengambil pendekatan yang terlalu formal atau terkesan menggiring opini. Kami ingin memastikan bahwa hubungan kami dengan masyarakat bersifat lebih organik dan bahwa komunikasi kami bersifat dua arah. Kami percaya bahwa perubahan yang kami usahakan harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi nyata rakyat, dan bukan hanya sebagai respons terhadap umpan balik yang diterima. Demokrasi bagi kami bukanlah sekadar lapisan permukaan, tetapi merupakan bagian integral dari setiap interaksi di berbagai tingkatan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara langsung dan turun langsung ke masyarakat untuk memastikan bahwa suara rakyat terdengar dan diwakili dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Bayu Setiawan dan Bapak Khairul Rizal, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat memiliki peran yang penting dalam sosialisasi politik di masyarakat khususnya Kota Langsa. Mereka aktif melaksanakan program sosialisasi dengan berbagai metode, termasuk pertemuan tatap muka, pendidikan politik, serta berbagai kegiatan dan acara yang melibatkan interaksi

langsung dengan masyarakat. Partai Demokrat juga berusaha membangun komunikasi yang organik dan dua arah dengan masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Langsa. Mereka menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, sambil menghindari pendekatan yang terlalu formal atau manipulatif. Dengan demikian, Partai Demokrat berkomitmen untuk menjaga prinsip demokrasi sebagai bagian integral dari interaksi politik di semua tingkatan masyarakat, dan mereka berupaya untuk menjadi perwakilan yang baik bagi suara dan aspirasi rakyat.

3. Partai Sebagai Sarana Rekrutment Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment), dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik. Wajar saja apabila ada partai politik berlomba-lomba untuk merekrut seseorang untuk dijadikan anggota atau kader, apalagi seseorang tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam penggalangan massa atau dari segi financial yang dapat membantu jalannya sebuah partai politik, contoh dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Presiden, partai politik sangat bersaing sekali untuk bisa menjagokan calonnya, yang kadang-kadang berasal dari luar partai, hal ini disebabkan oleh pengaruhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setiawan, S.E selaku Wakil I DPD Partai Demokrat Aceh sebagai berikut:

“Salah satu fungsi dan peran partai agar dapat memberlangsungkan kader Demokrat, selalu melaksanakan perekrutan kader yang dilaksanakan keterbukaan untuk masyarakat agar memperluas partisipasi politik”.

Adapun lanjutan wawancara dengan Bapak Mahrudin sebagai berikut:

“Rekrutmen Partai Demokrat di buka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung dengan Partai Demokrat kota Langsa, tinggal datang saja ke kantor Demokrat di Desa Matang Seulimeng (Gipsi Radio) dengan menyerahkan fotocopy KTP, dan dalam waktu dekat akan ada Kartu Tanda anggota (KTA) yang di tanda tangani oleh AHY yang di daftarkan secara online oleh staff di kantor Demokrat”.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara diatas perihal mengenai peran partai sebagai salah satu sarana rekrutmen politik Partai Demokrat memainkan peran penting dalam rekrutmen politik melalui partai politik dengan tujuan memperluas partisipasi politik. Mereka secara terbuka melakukan perekrutan kader dari masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk bergabung dengan partai. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari individu yang memiliki bakat dan potensi untuk berkontribusi dalam kegiatan politik serta memperluas basis partai. Dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk bergabung, Partai Demokrat berusaha untuk menjaga keterbukaan dan inklusivitas dalam proses rekrutmen politik. Langkah-langkah praktis seperti pendaftaran online dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh staf partai juga mendukung upaya mereka untuk memperluas jangkauan rekrutmen politik. Dengan demikian, partai politik, seperti Partai

Demokrat, turut berperan dalam memfasilitasi partisipasi politik masyarakat melalui rekrutmen kader yang terbuka dan inklusif.

4. Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Peran partai kepada petugas partai di legislatif dan eksekutif atas sebuah kebijakan, baik yang bersifat mendukung ataupun ketidaksetujuan dalam kerangka mengontrol pemerintah disampaikan melalui pendapat-pendapat yang bersifat formil dalam bentuk surat tertulis. Pendapat pendapat ini disampaikan melalui rapat struktural DPC partai, rapat fraksi atau secara langsung melalui Ketua Fraksi di DPRD. Partai juga dapat menyampaikan pendapatnya melalui media, diantaranya media publik baik elektronik maupun media cetak.

Berdasarkan problematika tersebut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Mahrudin sebagai berikut:

“Partai Demokrat akan memperjuangkan nya di parlemen, intinya kita tetap bersama rakyat, apa kepentingan rakyat berarti itu kepentingan partai Demokrat. Contohnya seperti cakdon mau di ambil alih oleh bank Aceh syariah dengan persetujuan pemko, masyarakat menolak, ya partai Demokrat juga menolak.”

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bapak Muslim A Gani selaku Pengamat Politik Kota Langsa yang menyampaikan bahwa:

“Partai Demokrat Kota Langsa sudah mempunyai peranannya walaupun tidak signifikan tapi jelas bahwa peran partai demokrat didalam kelembagaan DPRitu sudah ada dan terlihat ketika salah satu yang terakhir itu terkait dengan upaya pengalihan cakdon, artinya merka sudah berpihak pro rakyat”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Partai Demokrat Kota Langsa memainkan peran penting sebagai partai politik dalam mengatur konflik

dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Mereka menggunakan berbagai mekanisme formal untuk menyampaikan pendapat mereka, seperti melalui rapat struktural DPC partai, rapat fraksi, atau melalui Ketua Fraksi di DPRD. Selain itu, partai juga memanfaatkan media, baik elektronik maupun cetak, untuk menyampaikan pandangan mereka kepada publik.

Contoh konkret dari peran Partai Demokrat adalah dalam kasus pengalihan cakdon yang diusulkan oleh bank Aceh syariah dengan persetujuan Pemko. Meskipun pemerintah setempat menyetujui rencana tersebut, masyarakat menolaknya, dan Partai Demokrat turut serta dalam menolaknya. Mereka berpegang pada prinsip bahwa kepentingan rakyat adalah kepentingan partai Demokrat.

Berdasarkan pendapat dari pengamat politik, Partai Demokrat Kota Langsa telah memainkan peran yang signifikan dalam lembaga DPR, terutama dalam kasus pengalihan cakdon tersebut. Ini menunjukkan bahwa partai tersebut telah memihak kepada kepentingan rakyat dan melakukan tindakan nyata untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, Partai Demokrat Kota Langsa memainkan peran penting dalam mengatur konflik dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui proses politik di tingkat lokal.

E. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Peran DPC Partai Demokrat Kota Langsa Terhadap Public Policy Making

1. Faktor Kepemimpinan

Pengaruh faktor kepemimpinan dalam formulasi kebijakan publik adalah peran, aktivitas dan gerak langkah serta pemikiran-pemikiran alat kepanjangan partai atau petugas partai di eksekutif maupun yang berada di legislatif. Partai Demokrat masa periode 2019-2024. Berhasil menempatkan kader terbaiknya sebagai pemimpin pemerintahan Kota Langsa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Langsa dengan jumlah kursi yang diduduki 4 anggota dari Partai Demokrat yang menjadi ketua Fraksi Partai Demokrat merupakan Bapak Zulfikar selaku wakil ketua DPRK Langsa yang dilantik pada tahun 2022.

Formulasi kebijakan publik yang pada dasarnya berada pada proses komunikasi ditingkat basis rakyat benar-benar mendapatkan tempat untuk bertumbuh kembang, karena faktor kepemimpinan di pemerintahan yang dimiliki oleh Demokrat. Dapat dibayangkan jika Demokrat tidak mempunyai alat kepanjangan partai atau menempatkan kadernya di pimpinan pemerintahan, maka pengaruh formulasi kebijakan publik sudah tentu akan sangat kecil.

2. Faktor Solidaritas Partai Politik

Mengupas faktor solidaritas partai dimulai dari pengamatan tentang sistem manajemen dan pengelolaan organisasi, dan Demokrat masa periode 2019-2024

memulai membangun fondasi soliditas partai dari membenahan sistem manajemen dan pengelolaan administrasi. Tahap paling mendasar inilah kemudian mempengaruhi tatakelola organisasi secara holistik, karena jadwal kegiatan partai dipetakan dengan cermat sehingga roda organisasi berputar dan nafas kehidupan partai memberi angin segar bagi setiap kader untuk berada bersama sama bergerak membesarkan partai.

Soliditas partai di tingkat Cabang sangat terbantu dengan kondisi Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah yang mempunyai ketegasan untuk mengatur jalannya organisasi. Sistem komando yang dikembangkan dilaksanakan melalui kegiatan konsolidasi organisasi yang melibatkan struktural secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat Anak Ranting.

Pengaruh tersebut dilakukan secara kolektif oleh struktural partai, petugas partai di eksekutif dan legislative maupun oleh pendapat pendapat individu-individu anggota partai. Terkait dalam faktor soliditas ini tak lepas dari kupasan tentang tokoh, figure, kejujuran dan keteladanan yang ditunjukkan oleh petinggi partai. Dari sanalah muncul kepercayaan sebagai bibit utama dari munculnya soliditas partai. Jika soliditas itu terbangun maka secara umum dapat digambarkan bahwa dengan kondisi partai yang solid, maka dalam mengerjakan

program kerja partai, mewujudkan cita cita serta mengimplementasikan idiologi partai berjalan dengan lancar. Begitu pula sebaliknya dalam sebuah partai yang tidak solid maka yang terjadi adalah perpecahan dan konflik kepentingan antar kader ataupun antar elit, dengan demikian maka citra partai menjadi buruk, terjadilah krisis kepercayaan ineternal maupun eksternal, akibatnya sangat tidak mungkin partai mampu memecahkan problem sosial atau beraksi mempengaruhi kebijakan publik. Dalam hal ini terbukti syarat soliditas partai menjadi bagian penting dalam keterlibatan peran formulasi kebijakan publik.

F. Peran Partai Politik Terhadap Public Police Making Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Partai politik pada saat sekarang ini merupakan kendaraan seseorangkalau berminat menjadi salah satu penyelenggara pemerintah, apakahfungsinya sebagai eksekutif maupun legislative menurut Trias Political. Kalaudilihat sejarah, manusia mengenal partai politik sudah ada sejak saat erasepeninggal Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, karena Nabi selainsebagai Rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam di Saudi Arabiayang terbagi atas 4 (empat) golongan, yaitu : pertama, Partai BangsawanQuraisy Makkah (sebagai kelompok pendatang). Kedua, partai Yahudi(kelompok minoritas). Ketiga, partai Bangsawan Madina (kelompok pribumi)dan

terakhir, partai keluarga Nabi.

Dalam memahami good governance dari sudut pandang syariah, terdapat suatu konsep khilafah (kepemimpinan) yang mengandung maksud bahwa seorang pemimpin pemerintahan harus bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan tujuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi umat. Khilafah ini merupakan pengganti fungsi pembuat hukum Islam, yakni Nabi sendiri, dalam urusan agama dan keduniaan. Kepemimpinan disini dimaksudkan sebagai kepemimpinan yang menyeluruh yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti Rasulullah SAW.

Seseorang yang menjalankan fungsi khilafah disebut khalifah, yang berarti orang yang menggantikan (kedudukan) orang sebelumnya; orang yang menggantikan kedudukan orang lain; dan seorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu pertama, prosedur pengangkatan mereka sebagai pengganti Nabi Saw, kedua, wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada para pengganti Nabi Saw. Itulah konsep kepemimpinan dalam Islam dalam menggambarkan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem birokrasi kekeluargaan atau berdasarkan kedekatan terhadap Nabi, meskipun nilai-nilai demokrasi sudah muncul. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan ayat-ayat Al-quran

dan sunnah Nabi Saw. untuk menemukan nilai dasar yang dapat dijadikan rujukan kriteria pengelolaan sistem pemerintahan yang baik. Salah satu nilai yang ditunjukkan dalam Al-quran adalah tuntutan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Nilai itu menjadi rumusan asas hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Suhayli Sufyan. Lc, MA. selaku Akademisi dari bidang Hukum

Tatanegara Islam, sebagai berikut:

“Dalam sejarah Islam, penyampaian aspirasi politik memang sudah ada, meskipun belum dalam format partai politik seperti sekarang. Misalnya, dalam penentuan siapa yang akan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terdapat kelompok-kelompok seperti Anshar dan Muhajirin yang masing-masing memiliki calon pilihannya sendiri. Walaupun akhirnya semua sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ini menunjukkan bahwa ada proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang mirip dengan fungsi partai politik saat ini, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat”

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa fikih siyasah adalah salah satu bidang ilmu dalam ilmu fikih yang membahas tentang sistem politik dalam Islam yang objek bahasannya menyangkut kekuasaan yang mengedepankan kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan umat. Secara sederhana, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Seangkan dalam tinjauan korelasinya, maka fikih siyasah sangat berkorelasi dengan warga negara dengan negara, negara dengan negara lain.

Untuk merealisasikan tujuan dalam fikih siyasah/politik dalam Islam maka perlu dirumuskan beberapa kaidah yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan dalam kepemimpinan Islam. Di antara kaidah fikih di bidang fikih siyasah yang dianggap penting untuk diketahui, adalah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya; "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".

Maksud dari kaidah ini adalah setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembal amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Kaidah ini menegaskan kepada pemimpin bahwa kebijakan seorang pemimpin seharusnya berorientasi kepada kemaslahatan orang yang dipimpinnya, bukan mengikuti keinginan kelompok tertentu, keluarga atau mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang pada akhirnya mementingkan keinginan diri sendiri.

Kaidah ini dikuatkan di dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah swt berfirman di dalam QS al-Nisā/4: 58.

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامن الى اهلها واذا حكمتم بين

الناس ان تحكموا بالعدل^ق ان الله نعم ما يعظكم به^ق ان الله كان
سميعاً بصيراً

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Selain dari dalil Al-Qur'an, kaidah ini juga diperkuatoleh pendapat Umar bin Khattab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshūr:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني أنزل نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت تركته وإن احتجت أخذت بقدر حاجتي وإذا أيسرت رددته.

Artinya: Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan, aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan, aku menjauhinya.

Kaidah ini merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam setiap kebijakan untuk diterapkan dimasyarakat. Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu, setiap tindakan/kebijakan harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisir, dikontrol, di evaluasi serta dinilai dari manfaatnya dan menyingkirkan kemudharatan bagi masyarakat.

Upaya untuk lebih memahami dan merealisasikan kaidah tersebut di atas, maka bisa dilihat beberapa contoh, di antaranya adalah membuat irigasi kepada para petani supaya terhindar dari kekeringan lahannya serta mendapatkan hasil yang memadai. membuka lapangan kerja kepada masyarakat untuk menghindari pengangguran, melindungi hutan lindung serta menjaga lingkungan supaya terhindar dari banjir dan mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan profesional supaya terciptakeadilan dan kesejahteraan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting yang sesuai dengan good governance. Keberadaan masyarakat juga memiliki hal penting untuk menentukan legitimasi hukum dengan kesepakatan yang telah dilakukannya. Kebijakan-kebijakan yang dimunculkan menjadi sebuah masukan besar dalam mengarahkan sistem birokrasi tersebut.

Dalam good governance, nilai keadilan menjadi pertimbangan utama yang kemudian diturunkan dalam bentuk praktis berupa asas perlakuan yang sama (al-muamalah bi al-mithl). Perlakuan yang sama tersebut menjadi dasar hubungan antar manusia termasuk dalam pemberian layanan sosial, tanpa memandang hubungan kekerabatan, kelas sosial, pengaruh dalam masyarakat, dan struktur dalam pemerintahan. Memang tidak mudah untuk menerapkan prinsip ini karena sifat manusia yang gampang tergoda dengan iming-iming semata.

Berdasarkan konsep keadilan diatas, adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Dr.Muhammad Suhayli Sufyan. Lc, MA.selaku Akademisi dari bidang Hukum Tatanegara Islam, sebagai berikut:

“Dalam Islam, kita mengenal istilah seperti ahlul syura dan ulul amri. Konsep-konsep ini adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam yang tradisional. Sementara itu, partai politik dianggap sebagai elemen baru yang masuk ke dalam umat Islam. Selama partai politik tidak menghalalkan yang haram, tidak ada masalah. Islam sebenarnya terbuka terhadap berbagai sistem. Ketika orang memilih sistem demokrasi, berarti perangkat-perangkat seperti partai politik juga akan ada. Kalau kita lihat fungsi partai politik itu membentuk kebijakan kan gak mungkin tidak,jadi yang sepatutnya partai politik itu punya prinsip bahwa melaksanakan misinya untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu menegakan keadilan diantara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun partai. Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas dan kriteria lainnya yang penting dalam good governance adalah adanya transparansi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan keberpihakan pada rakyat ketika menentukan kebijakan publik. Kurangnya transparansi dalam penentuan kebijakan publik dan tidak diadikannya kepentingan masyarakat luas sebagai acuannya menjadi sumber maraknya praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan yang menyebabkan keterpurukan terjadi di berbagai aspek.

Kaidah ini dikuatkan di dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah swt berfirman di dalam QS. Al-Ma'idah (5:8) dan Surah An-Nahl (16:90)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُومٌ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Good Governace yang diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dalam suatu instansi baik partai politik itu sendiri atau organisasi lain baik di dalam maupun di luar pemerintah yang baik dan profesional. Dalam melaksanakan program pemerintahan tidak terbatas pada pemerintah saja, tetapi juga pada peran kekuasaan yang berada diluar pemerintahan. Good Governance sering dihubungkan pada sekumpulan atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu pemerintahan yang baik atau tidak. Nilai-nilai yang ada dalam pemerintah harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa berorientasikan pada

2hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal(efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnyapenyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepadaterciptanya fungsi pelayanan publik.Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi 104 asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan, penegasan mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali.

Dalam kaitan dengan pelayanan Publik terhadap masyarakat efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan

dan singkatnya waktu yang dihabiskan anggota masyarakat untuk suatu pelayanan yang berkualitas pelayanan yang tidak efisien ini mungkin juga bersumber dari paradigma birokrasi sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Dari konsep al-ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syaria dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah ciri lain dari good governance. Seorang pemimpin dengan birokrasinya harus merupakan sosok yang tanggap terhadap berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu good governance. Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partai Demokrat di Kota Langsa berperan penting dalam memajukan kepentingan rakyat melalui 14 prioritas partai. Partai

ini menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan melakukan kegiatan sosial seperti bantuan bencana dan perlindungan UMKM. Melalui program sosialisasi politik yang aktif, Partai Demokrat membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat dan mendorong partisipasi politik. Dalam rekrutmen, partai ini mengadopsi pendekatan inklusif. Partai Demokrat juga mengatur konflik dan mempengaruhi kebijakan di tingkat legislatif, dengan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dengan demikian, Partai Demokrat Kota Langsa memainkan peran signifikan dalam politik lokal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

2. Fikih siyasah, bagian dari ilmu fikih, membahas sistem politik Islam dengan fokus pada kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Konsep ini mengatur hubungan warga negara dengan negara serta antarnegara. Untuk mencapai tujuan politik Islam, kaidah-kaidah seperti kebijakan pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan umum diutamakan. Partisipasi masyarakat dalam good governance menentukan legitimasi hukum dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip seperti persamaan hak, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penting untuk pemerintahan yang bersih. Nilai-nilai ini harus diterapkan sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, serta mengutamakan kepentingan umum. Responsivitas terhadap aspirasi dan

kebutuhan masyarakat, serta tanggung jawab pemimpin, adalah aspek penting dalam pelayanan publik yang efektif.

B. Saran

1. Penting bagi Partai Demokrat untuk terus terhubung dengan warga Kota Langsa. Mereka bisa mengadakan forum publik, pertemuan komunitas, atau melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui dialog yang terbuka, partai dapat mengumpulkan masukan berharga untuk membentuk kebijakan yang lebih baik.
2. Penting bagi Partai Demokrat untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah transparan dan akuntabel. Masyarakat harus diberikan akses yang memadai terhadap informasi tentang kebijakan yang diusulkan dan bagaimana keputusan dibuat.